

PLURALITAS SYIAH DAN RELASI SUNNI-SYIAH DI ARAB DAN TIMUR TENGAH

Sumanto Al Qurtuby

*Pengajar Antropologi dan Kepala Komite
General Studies Scientific Research di
King Fahd University of Petroleum and
Minerals, Arab Saudi.
Email : squrtuby@gmail.com*



Fenomena dan gerakan anti-Syiah kembali marak di Indonesia. Dulu memang pernah ada kekerasan anti-Syiah tetapi sifatnya sangat lokal, terbatas, dan sporadik. Akan tetapi sejak era Reformasi, 1998, gerakan anti-Syiah bersifat nasional, tak terbatas, dan sistematis. Jika dulu, aktor utama kekerasan terhadap minoritas Syiah dilakukan oleh aktor-aktor lokal, kini gabungan dari tokoh-tokoh lokal, regional, dan nasional. Siapapun dan dari kelompok manapun pelaku dan dalangnya, karena Syiah adalah minoritas di Indonesia, maka mereka dalam banyak hal yang menjadi target dan obyek kekerasan.

Dewasa ini di Indonesia (dan juga di Malaysia), Syiah dikepung dari berbagai penjuru angin dengan berbagai dalil dan dalih: dari teologi-keagamaan (seperti ajaran-ajaran Syiah yang dianggap “menyimpang” dari kanon resmi Islam) sampai politik-kekuasaan (misalnya bahaya laten revolusi Syiah bagi NKRI). Jika dulu, pada masa Orde Baru, gerakan anti-Syiah didengungkan oleh Presiden Suharto dan kroninya karena kekhawatiran “virus” politik revolusi Islam Syiah di Iran pimpinan Imam Khomeini yang berhasil menumbangkan rezim Reza Pahlevi tahun 1979 akan menular di Indonesia, kini gerakan anti-Syiah dikomandoi

oleh sejumlah tokoh Muslim dan ormas Islam yang tidak hanya didasari oleh kekhawatiran berlebihan—dan mengada-ada—terhadap “efek domino” politik Syiah kontemporer di Arab dan Timur Tengah di Indonesia tetapi juga dilandasi oleh tuduhan penyimpangan teologi-keagamaan Syiah. Sayangnya, Syiah tidak hanya menjadi sasaran kritik sejumlah kelompok Islam radikal-konservatif tetapi juga target kekerasan fisik seperti yang terjadi di Sampang, Bogor, Lombok, dan sebagainya.

Tanpa bermaksud membela atau menyudutkan kelompok Islam tertentu di Tanah Air, tulisan ini ingin menjelaskan pluralitas Syiah dan kompleksitas hubungan Sunni-Syiah di negara-negara Arab Teluk dan Timur Tengah pada umumnya dengan harapan agar umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki pemahaman yang “*kaffah*” (komprehensif), bukan parsial, mengenai komunitas Syiah dan relasi Syiah-non-Syiah di Arab/Timur Tengah. Dengan pemahaman yang baik dan menyeluruh, diharapkan umat Islam tidak mudah untuk diadudomba dan diprovokasi oleh sejumlah kelompok tertentu yang memiliki agenda dan kepentingan politik-agama tertentu di Tanah Air. Juga diharapkan artikel ini bisa memberi kontribusi positif bagi pembangunan dan perwujudan perdamaian, pluralisme agama dan relasi antarkelompok masyarakat di Indonesia yang lebih toleran dan harmonis. Artikel ini memberi “perhatian khusus” pada Arab Saudi karena negara-kerajaan ini

menempati posisi sangat penting dan strategis kaitannya dengan pembahasan relasi Sunni-Syiah. Selain itu, karena saya tinggal dan bekerja di Arab Saudi, saya mengamati secara langsung dinamika hubungan antarkelompok agama, khususnya Sunni-Syiah-Wahabi. Data-data yang disajikan dalam artikel ini sebagian besar berdasarkan penelitian lapangan dan interaksi langsung saya dengan berbagai komunitas atau kelompok Islam di Arab Saudi, termasuk warga Syiah.¹

Kelompok Pro dan Kontra-Syiah

Sejak Presiden Suharto “menurunkan diri” dari kekuasaan dan diganti dengan “Orde Reformasi”, Indonesia ditandai dengan menjamurnya berbagai kelompok Islamis radikal-ekstrim-konservatif yang berhaluan Salafi-Wahabi yang getol dan bersemangat “mengislampuritakan” Nusantara serta anti terhadap kemajemukan sekte dan agama. Pada era Presiden Suharto, kelompok ini nyaris tak terdengar karena Pak Harto menerapkan “politik SARA” sehingga meminimalisir kerusuhan sosial antarkelompok masyarakat. Akan tetapi sejak Pak Harto tidak berkuasa, kelompok inilah yang justru menjadi “*mastermind*” (otak dan penggerak utama) sekaligus “*foot soldiers*” berbagai aneka kekerasan sosial-komunal di ma-

¹ Sebagian data dalam tulisan ini pernah saya tulis Majalah Gatra Edisi 27 Tahun XXI, 7 Mei, 2015. Sebagian lain saya posting di catatan-catatan “kuliah virtual”-ku di Facebook.

syarakat, termasuk memelopori gerakan anti-Syiah di Indonesia.

Kampanye dan propaganda anti-Syiah di Indonesia ini kemudian diperkeruh oleh sejumlah pihak, antara lain, pertama, kelompok “pro-Arab” (khususnya Saudi) atau tepatnya “*cheer-leaders*” Arab dan kontra-Iran yang selalu memproyeksikan Syiah sebagai kelompok politik-agama yang berbahaya dan berpotensi makar terhadap Negara Indonesia sebagaimana yang mereka lakukan di Arab dan Timur Tengah. Menurut kelompok ini, Syiah adalah ibarat “virus ganas” yang sewaktu-waktu, kapan saja, bisa menyerang ketika momentum dianggap tepat. Mereka juga menganggap Iran sebagai negara “produser Syiah politik” yang licik dan berbahaya yang berambisi untuk “meng-Syiah-kan” berbagai kawasan Islam, termasuk Indonesia, bukan hanya di Timur Tengah. Karena itu, bagi kelompok ini, sebelum Syiah berkembang biak di Indonesia, maka mereka harus dilumpuhkan. Ibarat pohon, sebelum tumbuh mekar, maka harus dibabat akarnya supaya mati.

Kelompok berikutnya, kedua, adalah kelompok anti-Arab (khususnya Saudi) dan pro-Iran. Jika kelompok “pro-Arab” dan “kontra-Iran” bisa dipastikan berasal dari “rumpun Sunni”, maka kelompok “anti-Arab” dan “pro-Iran” bisa dari kalangan Sunni dan Syiah. Jika kelompok pertama berusaha sekuat tenaga memproyeksikan Syiah (dan Iran) sebagai kelompok agama-politik yang membahayakan tatanan sosial-politik sebuah masyarakat, bangsa, dan negara,

kelompok kedua memproyeksikan Syiah sebagai “komunitas tertindas” yang selalu dizalimi dan menjadi target, objek, dan kekerasan “rezim Arab”. Jika kelompok pertama menganggap Iran sebagai “biang kerok” kekacauan sosial-politik, kelompok kedua menuding Saudi sebagai dalang kehancuran tatanan sosial-politik Timur Tengah. Jika kelompok pertama mengkampanyekan penderitaan Sunni di Iran, maka kelompok kedua mempropagandakan penderitaan Syiah di Saudi dan Jazirah Arab. Demikian seterusnya. Untuk mendukung pandangan masing-masing, kedua kelompok ini tidak segan-segan menyajikan data-data sepihak, bias, tidakimbang, dan tidak jarang bahkan memanipulasi fakta-fakta yang terjadi di kawasan Arab dan Timur Tengah.

Sayangnya kedua kelompok ini (ditambah sejumlah tokoh, masyarakat, dan kelompok Muslim tertentu di Indonesia) sering kali mengalami “overdosis kebencian” baik terhadap Syiah maupun Sunni. Bagi kelompok “pro-Iran” dan “kontra Saudi” mengatakan dan menyebarkan aneka berita dan informasi “*abal-abal*” tentang penderitaan kaum Syiah di kawasan Arab/Timur Tengah. Sementara bagi yang “pro-Saudi” dan “kontra Iran” mengatakan kaum Syiah adalah “umat bunglon” yang suka bergonta-ganti warna dan “jenis kelamin” alias munafik. Syiah, di mata kelompok ini, selalu salah dan dilahkan. Bersuara dianggap memberontak, diam dituduh sedang mempraktekkan *taqiyah*. *Taqiyah* adalah “doktrin” penyamaran atau peny-

embunyian identitas diri sebagai upaya penyelamatan. Maksudnya, menurut kelompok anti-Syiah, kebaikan atau diamnya pengikut Syiah itu hipokrit atau kamufase karena pada hakikatnya mereka adalah “orang-orang jahat” yang berbahaya dan berpotensi mengancam stabilitas agama, bangsa dan negara.

Padahal sebetulnya, jika mau jujur, “doktrin” *taqiyah* itu tidak hanya monopoli kaum Syiah. Hampir setiap individu—Syiah-Sunni, Muslim-non-Muslim, atau siapa saja—telah mempraktekkan “doktrin” ini karena manusia pada hakekatnya adalah, mengutip antropolog Abner Cohen, “*a political man*”, selain “*an economic man*”. Kaum Muslim di Barat dan negara-negara mayoritas non-Muslim lain, kaum non-Muslim di negara-negara mayoritas Muslim, kaum teis di negara-negara ateis, kaum minoritas terhadap kelompok mayoritas, kaum Sunni di Iran, kaum Syiah di Saudi dan seterusnya hampir semua mengamalkan “ajaran” dan “konsep” *taqiyah* ini. Di Saudi atau Qatar yang “mazhab negara”-nya berhaluan “Wahabi” atau “Salafi”, bahkan tidak hanya Syiah yang bertaqiyah, kelompok Sunni non-Wahabi juga melakukan *taqiyah* karena Syiah bukan satu-satunya kelompok yang tidak bisa “duduk sama rendah berdiri sama tinggi” dengan penguasa politik yang didominasi oleh pengikut Wahabi. Saya melihat kaum Muslim non-“Wahabi” atau non-Salafi di sini (baik Arab, Pakistan, India, Bangladesh, Afrika, juga Indonesia; baik Sunni maupun bukan) banyak yang “*ujug-ujug*” (tiba-tiba) menjadi

“Salafi” baik dalam hal berpotongan (berjenggot panjang, misalnya) berpakaian (misal, memakai *thaub* atau “jubah Arab”), maupun berpandangan (yang “khas” pemikiran Salafi) karena adanya dorongan kepentingan politik-ekonomi tadi (selain faktor-faktor lain tentunya). Jadi sekali lagi, keliru besar, jika konsep *taqiyah* itu hanya dialamatkan kepada kelompok Syiah. Bisa jadi mereka yang menuduh Syiah bertaqiyah itu sedang melakukan *taqiyah* juga.

Selanjutnya, mengatakan bahwa kaum Sunni di Arab/Timur Tengah selalu membenci, memburu, dan memerangi umat Syiah adalah “propaganda murahan”. Demikian pula, mengatakan kaum Syiah selalu menjadi “target kekerasan” Sunni di Arab/Timur Tengah juga merupakan “kebohongan publik” yang patut dicurigai motivasi dan tujuannya. Kedua kelompok di atas sama-sama tidak mengindahkan dinamika sosial-politik-keagamaan-kebudayaan serta keragaman dan kerumitan hubungan Sunni-Syiah di kawasan Timur Tengah. Perlu diketahui, seperti saya jelaskan nanti, bahwa konflik di Arab dan Timur Tengah adalah sangat kompleks dan beragam yang melibatkan banyak faksi, kelompok, dan aktor: tidak melulu Sunni-Syiah. Dan walaupun ada ketegangan antara sejumlah faksi dalam Sunni maupun Syiah tidak ada hubungannya dengan masalah akidah-keagamaan, melainkan lebih pada masalah ekonomi-kepolitikan. Walaupun ada “kelompok Islam” tertentu yang anti-Sunni atau anti-Syiah pasti dari “golongan radikal-ekstrem” atau kelompok milisi dan

veteran perang. Perlu juga untuk dicatat, banyak faksi dalam Sunni maupun Syiah di berbagai negara di kawasan Arab dan Timur Tengah yang saling berkoalisi dan bekerja sama untuk menciptakan stabilitas sosial dan keamanan regional di wilayahnya masing-masing.

Apa yang saya katakan ini sekedar untuk menegaskan bahwa tidak ada kelompok agama di dunia ini yang bersifat seragam, tunggal, dan monolitik (faksinya, pandangannya, sejarahnya dan seterusnya). Karena itu sangat disayangkan jika ada sejumlah tokoh dan kelompok tertentu seperti saya jelaskan di atas yang dengan heroiknya melakukan “kampanye kebencian” dan menggiring masyarakat agar membenci umat Syiah atau Sunni. “Masyarakat bawah”—dimanapun mereka, apapun agama dan sekte mereka—itu tidak menginginkan dan tidak membutuhkan keributan. Yang mereka perlukan adalah kedamaian karena dengan kedamaian itu mereka bisa bercengkerama, “*ngopi*” dan “*ngeteh*” bersama. Sering kali saya keluyuran ke berbagai pasar tradisional dan kedai kopi/teh di Saudi dan menyaksikan warga Sunni maupun Syiah “*jagon-gan*” (baca, duduk-duduk santai) bareng sambil *ngerokok*, *ngopi* atau *ngeteh*. Hal ini sudah menjadi tradisi dan kebiasaan warga setempat selama bertahun-tahun. “Masyarakat bawah” hanya membutuhkan stabilitas ekonomi dan jaminan keamanan politik karena dengan itu mereka bisa mendapatkan pekerjaan dan bekerja dengan aman-tentram untuk menghidupi anak-anak dan keluarga.

Itulah fakta-fakta dan realitas yang terjadi di negara-negara Arab Teluk seperti Saudi, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Oman, dimana umat Sunni maupun Syiah sama-sama bekerja membaaur di berbagai sektor publik sebagai karyawan, pedagang, pegawai, guru, penjaga toko, dan lain sebagainya.

Pluralitas Syiah di Timur Tengah

Seperti saya jelaskan sebelumnya, menganggap, mengasumsikan, apalagi menuduh Syiah sebagai kelompok monolitik, tunggal, dan seragam baik dari segi pemahaman teologi-keagamaan, praktek spiritualitas keislaman, maupun ekspresi politik pemerintahan dan kerakyatan adalah kekeliruan besar. Tidak ada kelompok agama dimanapun di dunia ini—bukan hanya dalam Islam tetapi juga dalam Kristen, Hindu, Budha dan sebagainya—yang memiliki pandangan, pemahaman, interpretasi, dan praktek politik-kebudayaan-keagamaan yang sama dan seragam. Syiah, sebagai kelompok Islam, juga sama dengan kelompok keagamaan dan keislaman lainnya yang jauh dari kesan tunggal.

Sebagaimana kaum Sunni yang beraneka ragam, Syiah juga sangat warnawarni: mazhabnya, spiritualitasnya, pengikutnya, tradisinya, kebudayaannya, pemahaman keagamaannya, afiliasi dan ekspresi politiknya, dan sebagainya. Sebagaimana Sunni, Syiah juga terpecah menjadi bermacam-macam golongan: Imamiyah (Itsna Asy’ariyah), Zaidiyah, Ismailiyah, Ismaili Nizari, Mustaali

Dawoodi Bohra, Alawi, Sulaimani Bohra dan lain-lain, yang masing-masing jauh dari kesan tunggal dan monolitik dalam hal apa saja baik hal-hal yang berkaitan dengan spiritualitas-keagamaan maupun politik-kebudayaan. Tidak semua dari kelompok Syiah ini misalnya yang membenci para sahabat Nabi (di luar “kubu Ali”) apalagi mengafir-sesatkan mereka seperti ditunjukkan oleh kaum Syiah Zaidi di Yaman dan Najran, Saudi. Meskipun kelompok Syiah ini menganggap sahabat Ali sebagai yang paling pantas menggantikan suksesi kepemimpinan paska wafatnya Nabi Muhammad, mereka tidak serta merta lantas menghujat dan menyesatkan para kubu rival Sayyidina Ali.

Bukan hanya kelompok Syiah Zaidi, pengikut Syiah Imamiyah pun memiliki sikap dan pandangan beragam. Mahdi Al-Mabrook, seorang pengikut Syiah Imamiyah dan warga Saudi, menjelaskan kepada saya bahwa tuduhan bahwa semua pengikut Syiah itu anti—apalagi sampai mengafirkan—para sahabat Nabi yang kontra Sahabat Ali adalah bohong besar dan bermotif propaganda yang disebarluaskan oleh kelompok-kelompok anti-Syiah. Ia mengatakan, bagaimana mungkin kami mengafirkan para sahabat Nabi yang turut memperjuangkan Islam melawan para “kafir Quraisy”. Bahwa Syiah tidak setuju dengan tindakan “penyerobotan politik” sejumlah sahabat Nabi atas otoritas Ali memang benar tetapi bukan berarti kami membenci dan menyesatkan mereka. Mahdi menegaskan, walaupun

ada pengikut Syiah yang sampai mengafir-sesatkan para sahabat Nabi diluar Ali dan keluarganya, maka sudah dipastikan mereka berasal dari golongan “Syiah ekstrim” yang tidak mewakili atau merepresentasikan pandangan dan sikap umat Syiah secara keseluruhan. Mahdi tidak sendirian dalam hal ini. Sejumlah warga, tokoh, dan ulama Syiah di Arab Saudi yang saya temui dan wawancarai seperti Syekh Humaidan al-Qatifi dan Sayyid Hasyim bin Muhammad bin Nasr al-Salman juga mengeskpresikan hal serupa.

Hal lain yang perlu diklarifikasi supaya tidak “gagal paham” memahami fenomena Syiah adalah soal pengaitan Syiah dengan negara Iran dan etnik Persi dan tindakan pembelaan terhadap minoritas Syiah di Indonesia dianggap sebagai “anti-Arab” dan “pro-Iran/Persi”. Ini jelas keliru besar. Hanya orang-orang yang “pikun wawasan” yang menganggap Syiah itu non-Arab. Sebagaimana pengikut Sunni yang lintas-negara dan lintas-etnis (Arab, Pashun, Bangla, Baloch, Kurdi, Persi, Hui, Khuwala, Uyghur, dan lain sebagainya), pengikut Syiah juga lintas-etnis dan lintas-negara. Pemeluk Syiah bukan hanya beretnik Persi (dan etnik Persi bukan melulu Syiah karena banyak pengikut Sunni Persi) tapi juga Arab, Baharna, Hasawi, Hazara (di Afganistan), Assyria, Pastun Bangash, Khoja, Kurdi dan sebagainya. Keragaman etnis tentu saja berdampak pada kemajemukan pemahaman keagamaan dan praktek kebudayaan pengikut Syiah.

Iran juga bukan satu-satunya rumah buat kaum Syiah. Komunitas Arab-Syiah tersebar di seantero negara-negara Arab dan Timur Tengah: Yaman, Bahrain, Kuwait, Irak, Lebanon, Suriah, Mesir, Oman, Uni Emirat Arab, Yordania, Qatar, Maroko, dan bahkan Saudi. Populasi Syiah sangat besar di negara-negara ini bahkan sebagian menjadi mayoritas seperti di Irak dan Bahrain. Di Saudi komunitas Arab-Syiah sekitar 10-15 persen, di Lebanon sekitar 35 persen, di Yaman sekitar 40 persen. Bukan hanya negara-negara Arab, komunitas Syiah juga tersebar luas di Turki, Afganistan, Azerbaijan, Pakistan, India, Bangladesh, dan negara-negara pecahan Uni Soviet seperti Kazakhtan, Uzbekistan, Tajikistan, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, umat Syiah juga tersebar-luas di negara-negara Barat seperti Amerika, Inggris, dan Australia. Karena setiap negara memiliki dinamika politik dan perkembangan keagamaan yang berlainan, maka ekspresi politik-keagamaan warga Syiah pun berbeda-beda dari satu negara ke negara lainnya. Di Cina, misalnya, hampir-hampir tidak ada perseteruan Syiah-Sunni karena keduanya mempunyai "nasib yang sama" menghadapi rezim komunis. Hal yang sama juga terjadi di Lebanon, dimana Sunni-Syiah berkoalisi menghadapi Israel. Di Afganistan, warga Sunni dan Syiah sama-sama menjadi target kelompok Salafi ekstrimis Taliban. Di negara-negara Barat, baik Sunni maupun Syiah (dan kelompok-kelompok Islam lain seperti Ahmadiyah) sama-sama sibuk

mengkampanyekan "Islam *rahmatan lil alamin*" untuk menghadapi "serbuan" dan kampanye negatif kelompok Islamophobia.

Dari aspek politik, pengikut Syiah juga beraneka ragam ekspresi dan afiliasi politiknya. Lagi-lagi, asumsi atau bahkan tuduhan bahwa komunitas Syiah itu monolitik dan memiliki "agenda politik" seragam juga salah fatal. Rezim Syiah Irak pernah berseteru dengan Rezim Syiah Iran gara-gara terlalu banyak intervensi urusan politik domestik Irak. Komunitas Syiah di Yaman juga banyak yang kontra rezim Houti. Hal yang sama juga terjadi di komunitas Syiah Saudi. Dengan kata lain, komunitas Arab-Syiah tidak serta merta pro-Syiah-Iran (Persi) dan anti-Arab Sunni. Karena berbeda etnik, teritori, dan negara, kesamaan teologis (ke-Syiah-an) tidak menjamin persatuan politik (baca, pro-Iran). Sentimen dan konflik klasik etnik Arab-Persi masih kuat hingga kini. Waktu rezim Syiah Houti Yaman diserbu Saudi, banyak warga Syiah Saudi yang ikut mendukung pemerintah Saudi karena mereka beranggapan "Syiah Yaman" berbeda dengan Syiah Saudi. Kontras dengan anggapan sebagian umat Islam di Indonesia, warga Syiah di Saudi justru menganggap Syiah Zaidiyah di Yaman itu lebih mirip Sunni ketimbang Syiah. Karena kepentingan politik-ekonomi dan identitas kesukuan, warga Arab Syiah di Teluk (dan juga negara-negara lain di Timur Tengah) juga banyak yang pro pemerintah setempat yang dikontrol Sunni ketimbang membelot ke Iran.

Meskipun tentu saja ada beberapa “faksi Syiah” di sejumlah negara-negara Arab dan Timur Tengah yang “berselingkuh” dengan Iran.

Hasil perbincangan saya dengan sejumlah ulama Syiah Saudi seperti Syeikh Humaidan al-Qatifi, Sayyid Hasyim al-Salman, dan Syeikh Ibrahim al-Bathout ditambah murid-murid Syiah-ku dari berbagai daerah seperti Ahsa, Qatif, Al Khobar, dan Saihat yang merupakan kantong-kantong Syiah di Arab Saudi juga menunjukkan fenomena keragaman ekspresi politik-ekonomi komunitas Syiah. Menurut mereka, seandainya terjadi perang antara Saudi dan Iran, maka mereka dan warga Syiah Arab Saudi pada umumnya akan membela Saudi, bukan Iran. Alasannya, menurut mereka, pertama, Saudi adalah negara dan “tanah air” mereka dimana mereka lahir, tinggal, hidup dan mati. Kedua, mereka beretnik/bersuku Arab sementara Syiah Iran adalah etnik Persi. Sejumlah warga Syiah Saudi, khususnya di daerah Najran yang berbatasan dengan Yaman, memang ikut bergabung dalam “koalisi suku-suku Arab” untuk menghalau dampak pemberontakan rezim Syiah Houti di Yaman. Fakta ini menunjukkan bahwa kampanye tentang bahaya laten “Syiah global” (atau “pan-Syiisme”) seperti yang marak di Indonesia itu sebetulnya hanyalah “propaganda murahan” dan mitos yang dibesar-besarkan oleh sejumlah kelompok ekstrim tertentu, baik kelompok agama maupun politik, yang memiliki kepentingan dan agenda

politik-ekonomi-keagamaan tertentu. Fenomena ini persis seperti dulu ketika Presiden Suharto dan Orde Baru yang mewanti-wanti “bahaya laten” Syiah bagi NKRI di Indonesia setelah terjadi Revolusi Islam Iran tahun 1979. Terbukti, semua kampanye dan propaganda itu hanyalah “pepesan kosong” belaka.

Memang benar bahwa Saudi dan Iran dewasa ini sering berseteru. Tetapi Jangan pernah punya anggapan bahwa konflik Saudi-Iran itu sama dengan konflik Arab-Persi apalagi konflik Sunni-Syiah. Saudi/Iran adalah “entitas politik”, Arab/Persi adalah “entitas etnis/suku” dan Sunni/Syiah adalah “entitas keagamaan”. Sebagai entitas politik-pun, Saudi dan Iran---juga negara-negara lain di jagat raya ini—bukanlah “monolitik” dan seragam: aktornya, kebijakannya, kepentingannya dan sebagainya. Semua tergantung kepada siapa yang memegang kekuasaan dan kepentingan temporal apa yang mengitarinya. Simak saja sejarah hubungan Saudi-Iran yang selalu dinamis. Sebelum rezim Khomeini, ketika Iran di bawah kekuasaan rezim Pahlevi, Saudi dan Iran adalah “sahabat sejati”, keduanya “nyusu” kepada “ibu kandung” yang sama: Amerika! Keduanya juga berkoalisi (di bawah komando Amerika Serikat kala itu) untuk membendung pengaruh komunisme Soviet di Timur Tengah. Ketegangan kedua negara baru terjadi setelah Pahlevi runtuh dan Imam Khomeini yang anti Amerika itu naik menjadi pemimpin Revolusi Islam Iran pada 1979. Saudi masih *ngeblok* Amerika, sementara Iran berkongsi ke

Soviet. Merasa mendapat angin, Iran memprovokasi negara-negara lain di kawasan Jazirah Arab dan Timur Tengah yang banyak pengikut Syiah-nya (seperti Irak, Lebanon, Yaman, Bahrain, termasuk Saudi) untuk menggalang revolusi sosial-politik. Provokasi rezim politik Iran ini membuat Saudi meradang, dan mulailah babak baru untuk menggalang “koalisi rezim Sunni” di seantero Arab dan Timur Tengah, khususnya Arab Teluk, guna mengontrol warga Syiah dan memproteksi wilayahnya dari pengaruh dan intervensi Iran.

Jika “rezim Sunni” bersatu, maka kelompok Syiah terbelah: ada yang “pro-Iran” tetapi ada pula yang tetap memilih “pro-Arab”. Di Saudi juga sama, ada yang pro-Iran, ada yang pro-Saudi. Tapi itu dulu awal-awal 1980-an. Sekarang kondisinya, seperti nanti dijelaskan secara detail di tulisan ini, sudah jauh berubah. Raja Fahd dan terutama Raja Abdullah yang dikenal moderat-liberal (keduanya sudah almarhum) membuat kebijakan baru rekonsiliasi dengan Syiah maupun Iran terutama ketika “negeri para mullah” ini dipimpin oleh Khatami yang moderat. Karena banyaknya program-program pemerintah Saudi yang menguntungkan dan memberi ruang positif Syiah, maka tidak heran jika banyak komunitas Syiah di Saudi yang saya temui dan wawancarai yang akan membela Saudi ketimbang Iran jika terjadi perang Saudi-Iran. Warga Syiah juga banya yang bergabung dengan Saudi dalam “koalisi nasional” melawan “pemberontak Syiah” di Yaman.

Bukan hanya di Saudi, hubungan konstruktif dan damai antara Sunni dan Syiah juga terjadi di Oman, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Qatar yang tergabung di Gulf Cooperation Council (GCC) dimana Saudi sebagai pemimpinnya. Simak saja Oman misalnya. Di negara-kesultanan ini hampir-hampir tidak memiliki catatan tentang kekerasan terhadap umat Syiah dan juga terhadap kelompok-kelompok minoritas lain, termasuk non-Muslim (Hindu, Budha, Jainisme, Zoroaster, Bahai, dan lain sebagainya) yang cukup banyak jumlahnya. Sayang sekali banyak sarjana dan pengamat yang luput meneliti tentang fenomena harmoni dan perdamaian antara-agama di Kesultanan Oman. Penting untuk diketahui, Oman adalah satu-satunya negara di kawasan Arab Teluk yang penduduknya mayoritas pengikut sekte Ibadiyah (Ibadi), sebuah faksi Islam yang lahir hanya selang 20 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Dengan demikian, sekte Ibadiyah lebih tua dari Syiah apalagi Sunni.² Penguasa Oman, Sultan Qaboos Bin Said Al Said yang menjadi penguasa sejak 1970 dan menjadi pemimpin pemerintahan terlama di Timur Tengah, juga pengikut setia sekte Ibadiyah yang sangat peduli

2 Selain Oman, Zanzibar juga mayoritas pengikut Ibadiyah. Selain di kedua negara ini, pengikut Ibadiyah juga tersebar di Aljazair, Tunisia, Libia, dan Afrika Timur. Meskipun ada yang menganggap Ibadi adalah pecahan Khawarij, para sarjana Ibadi sendiri menolak dikaitkan dengan “faksi radikal” Islam ini. Ada cukup banyak tokoh Ibadi yang populer seperti Ahmad bin Hamad al-Halili, Moufidi Zakaria, Sulaiman al-Barouni, Nouri Abusahmain, dlsb.

dengan relasi harmoni antar-masyarakat dan pemeliharaan situ-situs kesejarahan.

Selain Oman, negara-negara kaya lain di kawasan Teluk seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait juga cukup kondusif dalam menjaga hubungan dengan pengikut non-Sunni, khususnya Syiah. Seperti di Oman, catatan kekerasan anti-Syiah juga minim dan kecil sekali di sini. Meskipun ada sesekali kasus bom bunuh diri di masjid Syiah yang dilakukan oleh kelompok teroris tetapi itu secara umum tidak mempengaruhi relasi positif-harmonis Sunni-Syiah. Negara-negara ini adalah negara industri maju yang dipenuhi dengan penduduk migran baik Arab maupun non-Arab. Sebagai negara industri maju yang multi-etnik dan multi-kultural, penduduk setempat menyadari akan pentingnya menjalin hubungan positif dan konstruktif dengan kelompok lain. Semua itu tentu saja dimaksudkan untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan politik karena kemakmuran dan keamanan adalah kunci kenyamanan hidup. Kekerasan sosial hanya akan menyusahakan kehidupan semua warga dan umat manusia tanpa kecuali. Syaikh Mubarak Al-Nahyan (Menteri Kebudayaan dan Pengembangan Komunitas Uni Emirat Arab) suatu saat mengatakan bahwa Uni Emirat Arab sangat menghormati dan menghargai perkembangan dan perbedaan sekte dan agama, dan memang berbagai kelompok sekte dan agama dibiarkan berkembang di negara yang sering disebut "Singapore"-nya Timur Tengah ini. Di Bahrain dan

Saudi memang kadang-kadang terjadi friksi dan kekerasan terhadap kelompok Syiah tetapi lagi-lagi konflik itu dipicu oleh "kelompok sempalan" faksi politik tertentu atau, kalau tidak, oleh minoritas Islamis-ekstremis.

Kekerasan Anti-Syiah dan Hubungan Sunni-Syiah di Saudi

Banyak pihak menyebut Saudi-Wahabi sebagai "dalang" di balik gerakan anti-Syiah di Tanah Air. Tetapi menariknya, di Saudi sendiri gerakan anti-Syiah tidak sevilgar dan semarak di Indonesia. Tidak ada poster, spanduk, atau selebaran-selebaran provokatif kontra Syiah. Juga tidak ada pengajian-pengajian akbar anti-Syiah yang bergemuruh. Para khatib Jumat memang sering menekankan umat Islam untuk menghindari praktek bid'ah dan khurafat serta menjalankan ajaran Islam yang "murni dan konsekuen" yang sebetulnya merupakan kritik terhadap Syiah tetapi tidak menyebut secara langsung kesesatan Syiah. Yang sering menyebut Syiah secara terang-terangan sebagai heretik, *rafidah*, dan murtad adalah para ulama Wahabi ultrakonservatif.

Hal menarik lain di Arab Saudi dewasa ini adalah tidak adanya gerakan masif dari tokoh dan ormas Islam untuk memobilisasi massa guna menyerang kantong-kantong Syiah seperti terjadi di Indonesia. Kekerasan terhadap Syiah di Saudi lebih banyak dilakukan oleh "oknum" negara dan sayap ultraradikal Wa-

habi. Perlu dicatat tidak semua pengikut Wahabi adalah radikal dalam tindakan, meskipun mereka tentu saja radikal dan konservatif dalam pandangan dan pemikiran keislaman. Ada banyak teman-teman saya yang Wahabi yang tidak setuju dengan pandangan-pandangan keagamaan Syiah yang dinilai melecehkan Islam, Al-Qur'an, Nabi Muhammad, dan para sahabat, serta dianggap menyimpang dari ajaran fundamental Islam. Tetapi mereka menolak untuk melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap komunitas Syiah. Mereka bahkan menuding kekerasan anti-Syiah di distrik Dalwah di Saudi Timur, yang dilakukan oleh para penembak bertopeng pada November, 2014, dan sejumlah aksi bom bunuh diri di masjid Syiah di Qatif, Saihat, atau Ahsa yang melukai dan menewaskan berpuluh-puluh korban dilakukan oleh ekstremis ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) dan kelompok "Wahabi ekstrim" yang ingin mengusik stabilitas politik Saudi.

Pernah suatu saat, setelah kekerasan anti-Syiah meledak di kawasan Hasa, Saudi Timur, yang diduga dilakukan oleh para penembak jitu yang berafiliasi ke ISIS, saya, ditemani oleh warga setempat, keliling blusukan ke pasar, sekolah, *hawzah*, masjid, kuburan, dan sebagainya, serta wawancara dan ngobrol dengan para syaikh, imam, ulama, guru, pedagang, dan warga, baik Syiah maupun Sunni. Ekspresi mereka sama: kekerasan anti-Syiah selalu dilakukan oleh "kelompok militan" yang dimobilisir dari daerah-daerah lain.

Memang saya perhatikan setelah beberapa tahun tinggal di Saudi, tidak ada "kekerasan komunal" Sunni-Syiah di kawasan ini. Pelaku kekerasan memang biasanya dilakukan oleh "kelompok profesional" seperti penembak jitu (*sniper*) dan teroris, bukan oleh massa. Tidak pernah ada "gerombolan massa" apalagi sambil membawa pentungan, batu, dan aneka senjata tajam untuk mengepung warga Syiah serta merusak properti mereka seperti halnya terjadi di Indonesia. Di Saudi dan negara-negara Arab Teluk pada umumnya, jika ada kelompok massa yang menggeruduk warga Syiah atau sebaliknya, pasti sudah ditangkap, dipenjara, atau dieksekusi oleh aparat pemerintah karena dianggap mengganggu stabilitas sosial, politik, dan ekonomi negara. Aparat keamanan Saudi juga sudah menangkap dan mengeksekusi para pelaku penembakan warga Syiah di Ahsa dan pelaku pengeboman sejumlah masjid Syiah di Qatif, Saihat, Al Khobar dan lain-lain yang dilakukan oleh sindikat ISIS. Warga Syiah yang saya temui juga memaklumi, pelaku kekerasan ini hanyalah "sejumput" kelompok ekstrim.

Karena itu saya ingin mengatakan dan menegaskan bahwa dalam konteks Saudi tidak ada kekerasan kolektif Sunni-Syiah yang melibatkan massa warga masyarakat. Para tokoh masyarakat, ulama, dan warga Syiah yang saya temui di Qatif, Ahsa, Najran, Khobar dan lain-lain menyatakan tidak ada masalah sedikitpun dengan Sunni. Demikian pula kaum Sunni, biasa-biasa saja dengan

warga Syiah karena memang pengikut Syiah di sini hanya bermasalah dengan kelompok minoritas “Wahabi/Salafi ekstrim” tadi. Ingat hanya dengan “Wahabi/Salafi ekstrim” saja karena tidak semua kelompok Wahabi juga berseteru dengan Syiah. Banyak dari mereka yang, meskipun tidak setuju dengan pandangan-pandangan keagamaan Syiah, lebih memilih pasif dan diam. Juga perlu diingat, bukan hanya Syiah yang dikafir-sesatkan oleh kelompok “Wahabi/Salafi ekstrim” ini tapi juga warga Sunni, kaum Sufi, dan sekte-sekte lain. Bahkan kelompok “Wahabi moderat” juga dituduh “kurang Wahabi”.

Juga penting untuk dicatat bahwa tidak semua rezim Saudi adalah anti-Syiah. Mending Raja Fahd (1921-2005) dan Raja Abdullah (1924-2015), misalnya, adalah sosok pemimpin moderat-progresif yang proaktif menggalang toleransi, perdamaian, dan rekonsiliasi terhadap Syiah. Raja Fahd pernah menginstruksikan untuk menghapus semua kata dan istilah yang mengandung nuansa penghinaan dan pelecehan terhadap Syiah dari buku-buku teks yang dipakai di sekolah-sekolah untuk kemudian diganti dengan istilah-istilah yang lebih toleran dan bersahabat. Ia juga memerintahkan untuk menghilangkan segala kebijakan diskriminatif anti-Syiah, membolehkan pengikut Syiah Saudi di pengasingan untuk pulang, melepaskan para pemimpin Syiah dari tahanan, membolehkan warga Syiah untuk bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan dan sektor swasta, serta aneka *policy* progresif lain untuk mem-

perbaiki kondisi warga Syiah di Saudi. Di universitas milik Kerajaan Saudi tempat saya mengajar saat ini, King Fahd University, juga banyak dijumpai para profesor Syiah dan beberapa di antaranya menduduki jabatan sebagai dekan atau ketua departemen seperti Samier Al-Bayat, Badr Al-Humaidi, Jaafer bin Moosa, dan lain sebagainya. Raja Fahd bahkan pernah memecat Imam Masjid Nabawi di Madinah karena melakukan propaganda anti-Syiah pada waktu khutbah Jum'at ketika ada kunjungan Ayatullah Akbar Hashemi Rafsanjani.

Raja Abdullah juga menerapkan kebijakan yang tidak kalah spektakuler dengan pendahulunya, Raja Fahd, seperti membolehkan warga Syiah untuk menggunakan buku-buku Syiah di sekolah-sekolah mereka. Ia juga merevisi kurikulum nasional dan memasukkan materi-materi non-Wahabi ke dalam kurikulum agar para siswa bisa mempelajari dan memahami aneka ragam pandangan keislaman. Raja Abdullah juga aktif menggalang dialog dengan para tokoh Syiah Saudi kharismatik seperti Sheikh Hassan al-Saffar. Singkatnya, almarhum Raja Abdullah, seperti ditulis Rob Sobhani dalam buku *King Abdullah of Saudi Arabia: A Leader of Consequence* dengan berbagai kebijakan pluralis-progresifnya di bidang pendidikan, perdamaian, politik-ekonomi, keagamaan, emansipasi perempuan dan lain sebagainya—berbagai upaya dan kebijakan yang sering kali mendapat protes, kritik, dan tantangan dari kubu konservatif-radikal Wahabi—turut membantu menciptakan

stabilitas politik Arab Saudi meskipun berbagai negara Arab dan Timur Tengah diguncang kekacauan sosial dan revolusi politik sejak 2010. Sejumlah tokoh dan ulama Syiah Saudi yang saya wawancarai seperti Sheikh Ibrahim al-Battat, Sayyid Hashim bin Muhammad bin Nasr al-Salman, dan Sheikh Humaidan al-Qatifi juga mengekspresikan rasa simpati dan hormatnya kepada Raja Abdullah yang menerapkan sejumlah kebijakan positif-konstruktif terhadap Syiah.

Memang harus diakui upaya pembangunan perdamaian, relasi positif, dan rekonsiliasi Sunni-Syiah di Saudi—dan juga negara-negara lain di Arab dan Timur Tengah—bukanlah perkara mudah mengingat perseteruan kedua kelompok Islam ini sudah “mengerak” dan berlangsung sejak ratusan tahun silam. Syiah juga memiliki sejarah kelam di Arabia. Sejarah dan asal-usul Syiah di kawasan ini sering dikaitkan dengan sekte Qaramitah, sebuah kelompok agama sinkretik yang memadukan elemen-elemen Syiah Ismailiyah dengan mistisisme Persia, yang berpusat di al-Ahsa (Hasa) di Provinsi Ash-Syarqiyah. Pada 899 M, kelompok ini pernah mendirikan sebuah negara utopis berbasis agama. Sekte vegetarian ini—karenanya sering disebut al-Baqliyyah—juga pernah melakukan pemberontakan terhadap Dinasti Abbasiyah. Pemimpin sekte ini, Abu Tahir al-Jannabi, pada tahun 930 M, pernah memimpin pengepungan kota Makah, mencuri dan memindahkan Hajar Aswad ke al-Ahsa, serta mengotori sumur Zamzam dengan tumpukan mayat.

Sekte Qaramitah sudah tenggelam dalam limbo sejarah. Kaum Syiah masa kini yang menempati Saudi adalah pengikut Imamiyah (Itsna Ashariyah) sebagai mayoritas yang kebanyakan tinggal di Provinsi Ash-Syarqiyah di ujung timur Saudi, khususnya Ahsa, Qatif, Khobar, dan Dammam yang merupakan daerah kaya minyak dan pusat industri. Ada juga pengikut Syiah Imamiyah di Madinah yang menamakan diri Nakhawila. Pengikut Syiah lain, seperti Zaidiyah dan Ismailiyah, kebanyakan tinggal di Provinsi Najran di Saudi Selatan yang berbatasan dengan Yaman. Tidak ada data statistik resmi tentang jumlah kaum Syiah di Saudi tetapi sejumlah pengamat memperkirakan sekitar 10% dari total warga negara Saudi yang kini berjumlah sekitar 20 juta jiwa (ditambah sekitar 10 juta kaum migran). Mayoritas penduduk Saudi adalah pengikut Sunni non-Wahabi yang tersebar hampir merata di berbagai kawasan. Sementara itu pengikut Wahabi sebagian besar hanya terkonsentrasi di Provinsi Riyadh dan Qasim di Saudi bagian tengah.

Meskipun sekte Qaramitah yang brutal itu sudah menjadi sejarah masa lalu, tetapi memori masyarakat Islam Sunni modern di Saudi terhadap sejarah gelap sempalan Syiah Ismailiyah ini masih begitu kuat sekuat memori kaum Syiah kontemporer atas tragedi pembantaian Husein bin Ali oleh Khalifah Yazid I di Padang Karbala pada 680 M. Sejak Perang Karbala itu, kecurigaan, ketegangan, konflik, dan kekerasan an-

tara pengikut Sunni dan Syiah terus berlanjut hingga berdirinya Kerajaan Saudi modern pada tahun 1932. Tetapi satu hal yang penting untuk dicatat bahwa perseteruan dan perpecahan umat Islam ke dalam Sunni dan Syiah itu semula berakar pada konflik politik-kekuasaan, bukan teologi-keagamaan.

Memang perseteruan politik-kekuasaanlah yang membuat relasi kedua kelompok ini terus menegang dan meruncing. Dalam konteks sejarah Saudi modern, meskipun Ahsa sebagai salah satu basis Syiah sudah ditaklukkan oleh tentara Saudi sejak 1913, ketegangan dengan kelompok ini meruncing sejak Imam Khomeini sukses memimpin Revolusi Islam Iran dan menggulingkan Shah Pahlevi pada tahun 1979. Merasa mendapat momentum, Iran sendiri berambisi mengeksport spirit dan ideologi revolusinya ke negara-negara lain di Timur Tengah, termasuk Saudi. Seruan-seruan anti dan penggulingan “Dinasti Saudi-Wahabi” dan dukungan terhadap Republik Islam Iran pun ditebar melalui pamflet, kaset tape, dan radio. Salah satu tokoh Syiah Saudi dan dianggap sebagai “perpanjangan tangan Iran”—yang gencar mengkritik pemerintah adalah Nimr Baqr al-Nimr. Kekerasan terhadap Syiah pun beberapa kali meledak yang berbuntut pada pemenjaraan dan penangkapan tokoh-tokoh Syiah yang di kemudian hari dibebaskan oleh Raja Fahd setelah naik tahta pada 1982. Hingga kini, Saudi dan Iran sama-sama berambisi menjadi “penguasa regional” Timur Tengah yang berbuntut pada perang di

berbagai tempat. Perang di Yaman, Syria, atau Irak hanyalah contoh kecil dari “adu dominasi” dua negara ini. Tapi ini, sekali lagi, masalah “geo-politik” regional Timur Tengah, bukan masalah teologi-keagamaan.

Dalam konteks politik domestik Saudi, Syaikh Nimr Baqr al-Nimr memang tokoh Syiah pro-Iran yang paling vokal menentang rezim Saud sehingga berkali-kali dipenjarakan dan akhirnya dihukum mati dalam sebuah eksekusi massal yang kemudian memunculkan reaksi pro-kontra di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Meski ada 47 tersangka gerakan terorisme, separatisme, sektarianisme dan ekstremisme yang dihukum mati dalam eksekusi massal itu, hanya Syaikh Nimr yang banyak diberitakan. Padahal ada sejumlah tokoh ekstrim-radikal yang ikut dipenggal termasuk Faris Al-Shuwail, gembong Al-Qaeda di Saudi. Sebagian besar mereka dihukum karena kasus “terorisme domestik” yang menimpa Arab Saudi sejak beberapa tahun silam. Hukuman terhadap “kelompok teroris” ini semakin gencar sejak Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh Putra Mahkota Muhammad bin Nayef yang “digadang-gadang” oleh Amerika dan warga Saudi sebagai pemimpin masa depan paska Raja Salman.

Sehubungan dengan eksekusi massal termasuk terhadap Syaikh Nimr yang sempat menjadi polemik itu, beberapa hal penting perlu dicatat di sini: pertama, Kerajaan Saudi tidak pernah kompromi terhadap aneka gerakan dan

aksi-aksi terorisme dan ekstremisme siapapun pelakunya (Wahabi, Syiah, Sunni, Ikhwan, Al-Qaeda, ISIS, dan lain sebagainya) karena dipandang dapat mengganggu dan mengancam stabilitas sosial-politik, ekonomi, dan keamanan negara dan masyarakat. Banyak para tokoh “Wahabi/Ikhwan radikal” yang dipenjara dan dieksekusi karena terlibat berbagai kasus kekerasan domestik seperti yang menimpa Juhayman al-Utaibi yang pernah “mengkudeta” Mekah.

Kedua, eksekusi terhadap Syaikh Nimr al-Nimr bukan karena kapasitasnya sebagai “tokoh agama Islam-Syiah” tetapi lebih karena keterlibatannya dalam berbagai upaya “makar” (separatisme dan sektarianisme) terhadap Pemerintah Saudi. Harap dicatat kata “makar” di sini tidak harus diartikan sebagai “gerakan politik kekerasan fisik” misalnya melalui pemberontakan atau revolusi tetapi juga “gerakan politik kekerasan non-fisik” dalam bentuk agitasi dan propaganda anti-pemerintah misalnya melalui baik melalui tulisan maupun ucapan. Syaikh Nimr masuk kategori yang kedua ini. Seperti saya singgung sebelumnya, sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979 (dan diperkuat sejak tumbanganya “rezim Sunni” Saddam Hussein di Irak), para tokoh Syiah Saudi terbelah: ada yang “pro-Iran”, ada yang pro-Saudi.

Syaikh Nimr (selain Hamzah al-Hassan) adalah salah satu klerik Syiah yang dianggap oleh pemerintah Saudi sebagai “perpanjangan tangan politik Iran” yang paling gencar dalam melakukan aksi-aksi resistensi dan kritik

pedas terhadap Dinasti Saud. Syaikh Nimr adalah salah satu “sayap radikal” Syiah, tokoh “rejeksionis” dan pelopor gerakan oposisi (meski bukan dengan “angkat senjata”) terhadap Kerajaan Saudi yang sudah sejak lama membangun link dengan Iran untuk melawan pemerintah sambil menegaskan bahwa kedaulatan itu ada di “tangan Tuhan” (bukan di rezim Saud). Apakah semua tokoh-tokoh Syiah di Saudi semua pro-Syaikh Nimr? Jelas tidak. Ada banyak tokoh Syiah Saudi (seperti yang populer Syaikh Hassan Al-Saffar, Syaikh Jafar Al Shayeb, Sayyid Hasyim al-Salman, dan lain sebagainya) yang menentang tindakan-tindakan Syaikh Nimr dan kawan-kawan karena dianggap tidak “strategis” dan merugikan kepentingan umum warga Syiah Saudi. Banyak para tokoh Syiah Saudi yang lebih memilih “kompromi” dan “jalan damai” dengan, misalnya, bergabung di Forum Dialog Nasional yang diprakarsai oleh mendiang Raja Abdullah yang dikenal sangat moderat dan toleran terhadap kaum Syiah.

Sayangnya sejumlah tokoh dan kelompok agama dan masyarakat di Indonesia “tidak nyambung” dan bahkan “overdosis” dalam menanggapi kasus eksekusi terhadap Syaikh Nimr ini. Saya perhatikan “kubu liberal” mengkritik keras eksekusi terhadap tokoh ini sambil mewacanakan tentang diskriminasi “HAM Syiah” tanpa melihat posisi dan aksi-aksi kubu Syiah yang moderat dan pro-Saudi. Sementara “kubu radikal” melihat fenomena ini sebagai momentum untuk “mengganyang” Syiah

sampai dibawa-bawa ke negeri tercinta Indonesia. Tugas dan kewajiban utama umat Islam—dimanapun mereka berada, apapun mazhab dan sekte keislaman mereka—adalah memperbaiki moralitas (sebagian) manusia dan masyarakat

yang amburadul, membangun toleransi dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bermasyarakat, serta mewujudkan perdamaian global dengan semua umat manusia di jagat ini, baik yang beragama maupun bukan.